

Koordinasi Dalam Penanganan Banjir Pada Daerah Irigasi Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai

Pinta Uli Sitorus¹, Mohammad Ridwan Rangkuti²
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara^{1,2}
Pintaulisitorus2530@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan koordinasi pemerintah daerah (Komisi Irigasi) dalam upaya penanganan banjir di Dusun II, Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Komisi Irigasi terdiri dari Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan P3A. Pentingnya penelitian ini untuk dapat mengetahui langkah ataupun cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan banjir dan mengoptimalkan irigasi. Penelitian ini juga bermanfaat agar petani mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah yang diakibatkan oleh banjir di daerah persawahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka, dengan 12 total informan penelitian yang terdiri dari Komisi Irigasi, Dinas PUTR Dinas Pertanian Perkumpulan Petani Pemakai Air dan petani Dusun II, Desa Pematang Cermai. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: *Pertama*, Komisi Irigasi belum berjalan dengan optimal; *Kedua*, produksi padi mengalami peningkatan, namun pendapatan petani mengalami penurunan; *Ketiga*, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin yang masih belum berjalan dengan optimal, *Keempat*, diperlukan peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian. **Kata kunci:** Komisi Irigasi, Produktivitas Padi, Koordinasi, Kesatuan Tindakan, Komunikasi

Abstract

This study aims to determine and describe the coordination of the local government (Irrigation Commission) in flood management efforts in Hamlet II, Pematang Cermai Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency. The Irrigation Commission consists of the PUTR Office, the Agriculture Office and P3A. The importance of this research is to be able to find out the steps or ways taken by the government in the context of handling floods and optimizing irrigation. In addition, this research is also useful so that farmers know how to overcome problems caused by floods in rice fields. This research uses descriptive research method with qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations and literature studies, with 12 total research informants consisting of the Irrigation Commission, PUTR Office, Agriculture Office, Water User Farmers Association, and farmers of Dusun II, Pematang Cermai Village. The results showed the following: First, the Irrigation Commission has not run optimally; Second, rice production has increased, but farmers' income has decreased; Third, unity of action, communication, division of labor and discipline that is still not running optimally, Fourth, it is necessary to improve agricultural infrastructure and technology.

Keywords : *Commission on Irrigation, Rice Productivity, Coordination, Unity of Action, Communication*

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Kondisi alam, iklim dan cuaca yang mendukung menjadikan lahan pertanian di Indonesia lebih produktif dan cocok untuk dikembangkan lebih lanjut. Sektor pertanian dan ketahanan pangan sangat erat kaitannya, pasalnya sektor pertanian mengambil dan memainkan peran yang sangat penting

dalam mencapai ketahanan pangan karena sebagian besar produksi pangan berasal dari pertanian (Indonesia.go.id, 2022). Produksi pertanian yang berkurang dapat berdampak negatif pada ketahanan pangan, bahkan dapat mengakibatkan kurangnya pasokan makanan dan menyebabkan ketidakstabilan harga pangan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kelaparan dan malnutrisi di kalangan

masyarakat. Salah satu komoditas pertanian yang sangat berperan dalam menstabilkan ketahanan pangan adalah padi. Saragih, (2001) mengatakan bahwa padi sebagai tanaman pangan dikonsumsi kurang lebih 90% dari keseluruhan penduduk Indonesia untuk makanan pokok sehari-hari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, luas lahan pertanian padi di Indonesia mencapai sekitar 12,27 juta hektar. Produksi padi yang selanjutnya menjadi beras memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Beras adalah jenis tanaman pangan yang menjadi sumber bahan makanan utama bagi sebagian besar penduduk di Asia (Tribunnews.com, 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang beras terbesar di dunia dengan produksi padi yang mencapai sekitar 50 juta ton dalam per tahunnya meskipun Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Ada sekitar 270 juta penduduk Indonesia yang bergantung pada beras sebagai bahan pokok makanan utama, (Media Indonesia 2021).

Padi biasanya ditanam di lahan sawah yang membutuhkan air yang cukup. Padi menjadi komoditas pangan utama yang mempunyai nilai strategis yang sangat tinggi, sehingga diperlukan adanya penanganan yang serius dalam upaya peningkatan produktivitasnya. Besarnya peran pemerintah dalam pengelolaan komoditas pangan khususnya padi dapat dilihat mulai dari kegiatan pra produksi seperti penyediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan, sarana irigasi, kredit produksi dan penguatan modal kelembagaan petani.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Indonesia, dan Kabupaten Serdang Bedagai dijuluki sebagai lumbung padi di Provinsi Sumatera Utara. Seiring proses produksinya, berbagai kendala justru juga datang mempengaruhi hasil produksi. Penurunan hasil produksi ini disebabkan karena tidak terawat dan tidak memadainya sarana dan prasarana serta mengurangnya luas lahan. Kualitas hidup masyarakat yang semakin hari semakin meningkat mempengaruhi kebutuhan

hidup manusia, sehingga pembangunan pemukiman dan sarana prasarana dilakukan terus-menerus. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman.

Tabel 1. Produksi Padi di Kabupaten Serdang Bedagai Periode Panen 2020-2022

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)		Produksi (Ton)	
		2021	2022	2021	2022
1.	Kotarih	-	-	-	-
2.	Dolok Masihul	2.944	2.903	17.308	28.149
3.	Sipispis	364	182	2.140	1.171
4.	Dolok Merawan	-	-	-	-
5.	Tebing Tinggi	3.796	3.967	15.240	24.679
6.	Bandar Khalipah	5.379	4.976	31.479	33.353
7.	Tanjung Beringin	6.965	5.642	36.049	41.852
8.	Teluk Mengkudu	4.884	4.884	31.224	36.943
9.	Sei Rampah	4.370	5.763	30.327	34.036
10.	Perbaungan	10.602	10.242	72.213	69.853
11.	Pantai Cermin	7.488	7.036	49.303	56.210
12.	Silinda	278	278	1.078	2.364
13.	Bintang Bayu	37	31	229	190
14.	Serbajadi	1.724	1.906	8.795	9.259
15.	Tebing Syahbandar	350	500	1.025	4.296
16.	Sei Bambi	11.226	10.208	55.836	73.493
17.	Pegajahan	2.928	2.810	19.165	31.936
	Total	63.335	61.328	371.411	437.782

Sumber: Laporan Rekap Dinas Pertanian, 2023

Dengan demikian untuk meningkatkan hasil produksi padi, perlu diperhatikan kelima panca usaha tani, yaitu penggunaan bibit unggul,

pengolahan tanah, pemupukan, penggunaan pestisida, pengairan atau irigasi. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas pengairan atau irigasi untuk memastikan keterbutuhan air.

Sistem irigasi berarti mengatur ketersediaan air agar saat musim kemarau tanaman padi tidak kekurangan air, dan saat musim hujan, sawah tidak banjir. Perubahan iklim memang sulit untuk diantisipasi, namun kesiapsiagaan pemerintah sangat diperlukan dalam menghadapi terkait dengan permasalahan air. Salah satu bentuk kesiapsiagaan ini yaitu menyediakan irigasi. Irigasi adalah sistem pengairan pada tanaman dan lahan pertanian yang digunakan untuk memasok air ke lahan pertanian secara teratur, terkontrol, dan terjadwal. Menurut Mawardi Erman (2007) irigasi adalah usaha untuk memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk keperluan penunjang produksi pertanian. Dengan demikian, irigasi merupakan metode pengairan yang sudah canggih dengan tujuan membantu tanaman tumbuh dengan subur.

Bentuk kesiapsiagaan tersebut termasuk kedalam sebuah manajemen. Manajemen merupakan suatu proses mewujudkan tujuan yang diharapkan yang dalam hal ini adalah meningkatkan hasil produktivitas padi guna menjaga ketahanan pangan nasional. Henry Fayol (2010) mengemukakan bahwa ada lima fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), koordinasi (*coordinating*), pengontrolan (*controlling*). Lebih lanjut penelitian ini membahas salah satu dari fungsi manajemen yaitu koordinasi (*coordinating*) melalui lembaga/organisasi pelaksana yaitu Komisi Irigasi.



Gambar 1. Irigasi

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Agustus 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi mengatakan bahwa lembaga atau organisasi dalam pengelolaan daerah irigasi terdiri dari badan/instansi pemerintah terkait, yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Komisi Irigasi. Pemerintah dalam hal ini yang menangani irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Serdang Bedagai dengan anggotanya Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Komisi Irigasi yang dibentuk di Kabupaten Serdang Bedagai adalah Komisi Irigasi Kabupaten. Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai No 6 Tahun 2018 mengatakan bahwa Komisi Irigasi adalah organisasi yang dibentuk sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi serta menampung aspirasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten dengan melibatkan yaitu Dinas Pertanian dan Dinas PUTR, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten.

Komisi irigasi dalam menjalankan tugasnya memberikan laporan dan menyampaikan laporan yang wadah sangat membantu dalam rangka penentuan pola dan rencana tata tanam termasuk mendukung keberhasilan dalam proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tiap-tiap desa. Desa adalah bentuk kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan rumah tangga yang sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang telah diakui oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa, dengan demikian desa memiliki hak dan kewenangannya sesuai dengan pasal otonomi daerah dan desentralisasi. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa desa memiliki keterbatasan kewenangan.

“Situasi administratif desa telah membatasi kewenangan desa, khususnya dalam proses perencanaan dan keuangan. Kewenangan yang dilimpahkan oleh kabupaten dalam bidang pemerintahan merupakan kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan mempunyai banyak tanggung jawab karena tidak disertai dengan sumber daya yang cukup. Misalnya, desa mempunyai kewenangan untuk merekomenda-

sikan surat administratif tertentu, namun otoritas yang lebih tinggilah yang mengambil keputusan akhir” (M. Ridwan Rangkuti dan Zoraya A Rangkuti, 2023).

Salah satu desa yang memiliki daerah irigasi dengan kewenangan Komisi Irigasi adalah Daerah Irigasi Desa Pematang Cermai sebagai lokasi penelitian. Daerah irigasi ini mendapatkan sumber air utamanya dari aliran sungai Sei Martebing. Masih banyak permasalahan irigasi di Desa ini terkait dalam daerah irigasinya yang menjadi penyebab dari banjir seperti rusaknya tembok dan tanggul irigasi, kotor dan banyak sampahnya saluran daerah irigasi, serta kurangnya pintu irigasi.

Melalui Komisi Irigasi diharapkan koordinasi antara Dinas Pertanian dan Dinas PUTR Kabupaten Serdang Bedagai serta Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk memperhatikan dan memperbaiki infrastruktur pertanian berarti memberikan perawatan, pemeliharaan dan perhatian terhadap sarana dan prasarana pertanian yang sudah ada seperti tanggul, pintu irigasi, dan saluran irigasi yang sudah dilinning, membangun jaringan baru, melakukan rehabilitasi terhadap saluran irigasi, serta menerapkan teknologi pertanian terkini. Dengan demikian, padi yang ditanam terhindar dari banjir dan dapat dipanen dengan hasil produksi yang meningkat serta menjamin ketahanan pangan agar tetap terjaga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* dengan total 12 informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa keluhan dan laporan dari petani terkait dengan irigasi seperti kecilnya saluran irigasi sehingga tidak mampu menampung air dalam jumlah yang banyak, kotor dan banyak sampahnya saluran irigasi serta kurangnya pintu-pintu irigasi. Petani Dusun II Desa Pematang Cermai mengatakan bahwa irigasi tidak membantu mereka dalam meningkatkan hasil

produksi. Petani mengalami kerugian karena lahan pertanian yang terendam banjir dan mempengaruhi hasil produksi padi. Untuk dapat meningkatkan produktivitas padi, maka perlu diperhatikan keluhan dan laporan dari petani.

Ketika sebuah organisasi dibentuk maka koordinasi juga akan tumbuh dan berjalan di dalamnya. Koordinasi berperan penting untuk memastikan bahwa organisasi berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berjalan secara harmonis dan efisien. Sumber informasi yang disajikan dalam pembahasan ini dari wawancara bersama dengan sejumlah informan. Informasi yang diberikan merujuk pada indikator koordinasi menurut Hasibuan, (2019:88), yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan adalah kerja sama yang melibatkan pihak-pihak untuk tercapainya suatu tujuan akhir. Pihak-pihak yang akan memastikan bahwa semua tindakan dan usaha yang dilakukan sejalan dengan tujuan akhir. Dapat diartikan bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari setiap kegiatan individu-individu untuk memperoleh keserasian dan keselarasan serta dapat bekerjasama. Kesatuan tindakan menjelaskan antara Komisi Irigasi Kabupaten Serdang Bedagai yang harus mengatur dengan sedemikian rupa usaha-usaha dari tiap-tiap kegiatan individu dan anggotanya. Dengan demikian dengan adanya keserasian maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan dan hasil. Sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan P3A sebagai anggota dari Komisi Irigasi diharapkan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan mampu mengaitkannya dengan tindakan. Komisi irigasi sudah menjalankan perannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yakni Keputusan Bupati Nomor 131/18 13 Tahun 2022. Komisi irigasi bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Kesatuan tindakan digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan Komisi Irigasi sebagai lembaga koordinasi dapat bekerja dan berjalan bersama dengan anggota-anggotanya untuk mengoptimalkan irigasi dan menangani banjir.

Kesatuan tindakan sudah dilaksanakan oleh Komisi Irigasi, gabungan kerja dilakukan dengan melibatkan semua anggota yakni Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Gabungan kerja ini untuk mencari solusi akan permasalahan banjir yang terjadi secara terus menerus. Namun, kesatuan tindakan ini tidak berjalan dengan optimal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), laporan akan permasalahan banjir memerlukan proses yang lama dan untuk menunggu terealisasinya permintaan tersebut dan penyelesaian permasalahan banjir ini. Bapak Bulgaria juga mengatakan bahwa pernah mengajukan proposal pembangunan pintu air, proposal ini disetujui dan terealisasikan dalam proses yang cukup lama.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, maka setiap individu dalam organisasi dapat dikoordinasikan. Di dalam organisasi, komunikasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka partisipasi tiap-tiap anggota akan semakin tinggi. Seorang pimpinan juga memberitahukan tugas kepada anggotanya dengan komunikasi. Koordinasi yang baik berarti melibatkan komunikasi yang efektif antara individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam sebuah organisasi.

Komunikasi sebagai upaya yang dilakukan untuk merubah sikap dan perilaku orang lain melalui informasi ataupun ide yang disampaikan. Dengan demikian komunikasi yang jelas, terbuka dan teratur membantu untuk menghindari kesalahpahaman dan mendorong pertukaran informasi yang penting. Komunikasi yang terjadi di Komisi Irigasi dengan anggotanya dilakukan dengan berbagai cara secara terbuka baik formal melalui rapat dan informal melalui telepon. Pegawai dan anggota-anggota komisi irigasi juga menggunakan dan memanfaatkan alat-alat komunikasi untuk dapat saling bertukar informasi. Dapat dipahami bahwa Komisi Irigasi Kabupaten Serdang Bedagai mengkomunikasikan setiap isu dan permasalahan yang diterima.

Sejauh ini komunikasi yang terjadi antara Komisi Irigasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, IP3A, P3A dan petani sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari rapat yang diadakan 1 kali dalam 3 bulan dengan membahas agenda sesuai dengan laporan dan permasalahan yang sudah dikumpulkan. Pembahasan agenda ini selanjutnya akan diberikan tanggapan dan solusi yang nantinya itu akan diserahkan kembali kepada pemangku kewenangan. Namun, P3A sebagai salah satu anggota komisi irigasi tidak ikut serta di dalam rapat rutin tersebut. Ketua P3A yang sudah menjabat sejak 2010 tidak pernah mengikuti dan menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh Komisi Irigasi. P3A hanya pernah menghadiri rapat 1 kali saja, sementara rapat rutin dilakukan 1 kali dalam 3 bulan.

Komisi Irigasi juga kurang dikenal dan diketahui. Banyak petani khususnya petani Dusun II, Desa Pematang Cermai, bahkan P3A yang merupakan anggotanya tidak mengetahui apa itu Komisi Irigasi dan apa saja perannya bagi petani. Hal ini berarti Komisi Irigasi kurang dalam memberlangsungkan sosialisasi dan memperkenalkan organisasinya dengan petani. Komisi irigasi juga kurang dalam berkomunikasi dengan P3A, khususnya untuk mengkomunikasikan pentingnya untuk menjaga kebersihan saluran-saluran air dan tidak membuang sampah dengan sembarangan.

3. Pembagian Kerja

Suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidak dapat dilakukan seorang diri atau individu. Dibutuhkan dua atau lebih orang untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah organisasi perlu diterapkan indikator koordinasi yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja diartikan sebagai perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu di dalam organisasi dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan sejumlah kegiatan karena tiap-tiap individu tidak secara semua mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak semua individu memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas. Oleh karena itu, dilakukan pemilahan atau pembagian tugas dengan mempertimbangkan keahlian atau jabatan individu.

Pembagian kerja di Komisi Irigasi Kabupaten Serdang Bedagai didasari oleh Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 131/18 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komisi Irigasi. Dalam peraturan tersebut terdapat susunan organisasi, kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi Komisi Irigasi. Pembagian kerja pada Komisi Irigasi sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari Komisi Irigasi melakukan pembagian kerja bersama dengan Bappeda, Dinas PUTR, Dinas Pertanian. Komisi Irigasi memiliki empat (4) Pokja yaitu Pokja Peningkatan Produktivitas dan Pendayagunaan, Pokja Kelembagaan dan Usaha Tani, Pokja Advokasi dan Kerja Sama dan Pokja Perencanaan dan Pengelolaan Aset Irigasi. Komisi Irigasi juga memiliki anggota yakni P3A, GP3A dan IP3A yang berada langsung ditengah tengah petani dan yang akan melaporkan isu dan permasalahan terkait dengan pertanian di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan penelitian baik dari Komisi Irigasi, Dinas PUTR dan Dinas Pertanian bentuk pembagian kerja sudah terlaksana. Dinas Pertanian dalam pembagian kerjanya juga memiliki bagian dan organisasi yang langsung berada di lapangan bersama petani. Melalui pembagian kerja, maka diberikan kewenangan kepada tiap tiap organisasi atau kelembagaan untuk memberikan laporan ke Dinas Pertanian yang selanjutnya akan dibawa ke rapat dan sidang bersama Komisi Irigasi. Namun, indikator pembagian kerja ini juga belum berjalan optimal, dikarenakan tidak semua anggota mengetahui tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota, salah satunya adalah P3A.

4. Disiplin

Dalam setiap organisasi, setiap individu harus apat bekerja sama, dengan harapan dapat menghasilkan hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan bersama organisasi. Hal ini berarti menyangkut pada sikap, tingkah laku dan perilaku baik dari perorangan atau kelompok (bagian) yang patuh dan tunduk terhadap peraturan di dalam organisasi tersebut. Perilaku patuh dan tunduk ini lebih dikenal dengan kata disiplin.

Disiplin di dalam suatu organisasi adalah satu hal yang sangat penting, oleh karena itu disiplin merupakan salah satu indikator dalam

koordinasi. Disiplin adalah sikap dan perilaku yang patuh, taat dan menghargai peraturan. Disiplin juga dapat dipahami apakah pelaksanaan kegiatan dalam organisasi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Disiplin dapat mempengaruhi koordinasi yang terjadi di Komisi Irigasi Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Komisi Irigasi yakni Bapak Harry Wardhana yang memaparkan bahwa salah satu bentuk disiplin dari pegawai yaitu kehadiran, hadir tepat waktu dan hadir dalam rapat yang dilangsungkan. Kehadiran pegawai yang tidak tepat waktu dan beberapa pegawai yang tidak hadir dalam rapat merupakan bentuk ketidaksiplinan. berdasarkan hasil observasi P3A dan petani Dusun II Desa Pematang Cermai belum menunjukkan sikap disiplin. Se jauh ini masih terlihat banyak sampah dan rumput yang ditemukan di saluran irigasi Dusun II Desa Pematang Cermai.

P3A belum menerapkan indikator disiplin yakni dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan kebersihan dari saluran irigasi. Kemudian, petani juga belum disiplin dalam menjaga dan memperhatikan kebersihan saluran air yang berada di dekat lahan persawahannya, petani sering menggunakan saluran air sebagai tempat sampah saat mereka melakukan kegiatan merumput.

Hal ini sebenarnya bukan hanya ketidaksiplinan dari P3A dan Petani, tapi juga termasuk juga ketidaksiplinan dari Komisi Irigasi dalam mengontrol dan memastikan bahwa semua daerah irigasi dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Sampah dan rumput yang berada di saluran irigasi dapat menghambat laju air pada saat mengalirkan air, perihal sepele seperti ini yang sebenarnya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di daerah persawahan petani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan

1. Komisi irigasi belum berjalan dengan optimal,

2. Produksi padi mengalami peningkatan, peningkatan yang terjadi memang tidak secara signifikan, namun tidak mempengaruhi pendapatan petani. Pendapatan petani justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh banjir,
3. Indikator koordinasi yang kurang berjalan dengan optimal,
4. Diperlukan peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Komisi irigasi diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaannya melakukan penanganan banjir, supaya standar dan target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dan masalah yang terjadi dapat diminimalisir, ditangani dan dicegah.
2. Komisi irigasi kabupaten serdang bedagai bersama dengan anggotanya yakni dinas putr, dinas pertanian, p3a, seharusnya lebih meningkatkan koordinasi dengan lebih memperhatikan infrastruktur dan penggunaan teknologi pertanian seperti yang sudah diterapkan oleh petani di beberapa pulau jawa, salah satunya dengan pemantauan dan prediksi cuaca dan penggunaan sensor dan pemantauan tanaman.
3. Masyarakat juga harus memahami bahwasannya sangat penting untuk menjaga kebersihan saluran irigasi dan tidak membuang sampah dan rumput sembarangan ke irigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Erman, M. (2007). *Desain Hidraulik Bangunan Irigasi*. Alfabeta, Bandung.
- Fayol, Henry. (2010). *Manajemen Public Relations*. PT. Elex Media, Jakarta
- Handoko, T.Hani. (2000). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T.Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu .S.P. (2019). *Manajemen: Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2019). *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta : Bumi Aksara

Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.

Niken, rindasari. Dkk. (2020) evaluasi tata kelola dan kinerja kelembagaan komisi irigasi (komir) kabupaten pandeglang. *Jurnal ilmiah mahasiswa agroinfo galuh*, 7.3

Rangkuti, m. R., & rangkuti, z. A. (2023). The policy of village infrastructure service in deli serdang regency, indonesia. *Multidisciplinary reviews*, 6(3), 2023021.

<https://doi.org/10.31893/multirev.2023021>

Saki friska, dkk (2023). Relevansi evaluasi pengelolaan daerah irigasi talawaan meras provinsi sulawesi utara. *E journal unsrat*, 15.2

Saragih, b. 2001. Keynote Address Ministers Of Agriculture Government Of Indonesia. 2nd National Workshop On Strengthening The Development And Use Of Hibrid Rice In Indonesia. 1:10

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/mengawal-ketersediaan-pangan-nasional>. Diakses tanggal 27 April 2023

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/393247/indonesia-peringkat-ketiga-penghasil-beras-terbesar-di-dunia>. Diakses tanggal 28 April 2023

<https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/09/16/mengenal-padi-sebagai-makanan-pokok-masyarakat-indonesia-berikut-tahap-pertumbuhannya>. Diakses tanggal 28 April 2023

<https://paktanidigital.com/artikel/fakta-tentang-beras-di-indonesia/#.ZFFDpNpBzIU>. Diakses tanggal 1 Mei 2023.

<https://serupa.id/koordinasi-coordinating-atau-mengoordinasikan-dalam-manajemen/>. Diakses tanggal 1 Mei 2023